

Gig Economy di Indonesia: Analisis Dampak terhadap Kesejahteraan Pekerja dan Implikasi Kebijakan

Royhisar Martahan Simanungkalit^{*1}, Sapto Jumono², Muhammad Fachruddin Arrozi³, Agus Munandar⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

Email: royhisar@student.esaunggul.ac.id¹

****Corresponding Author***

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received: April 2026 Revised: May 2026 Accepted: July 2026 Keywords: <i>Gig Economy di Indonesia, Kesejahteraan Pekerja dalam Gig Economy, Keberlanjutan Tenaga Kerja Digital, Perlindungan Sosial untuk Gig Work, Fleksibilitas VS Keamanan Kerja</i>	<i>Gig economy telah muncul sebagai fenomena global yang secara signifikan mengubah lanskap ketenagakerjaan. Sistem kerja berbasis proyek dan fleksibel ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti kebebasan waktu, peluang kerja yang lebih luas, dan akses penghasilan tambahan. Namun, di balik fleksibilitas ini terdapat dampak ambivalen pada kualitas hidup pekerja dan keberlanjutan sosial. Ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan tekanan psikologis karena beban kerja yang tidak dapat diprediksi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja gig. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi ekonomi pertunjukan terhadap kesejahteraan individu, stabilitas sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menganalisis pengalaman pekerja gig di berbagai sektor dan meninjau kebijakan relevan yang mendukung ekosistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ekonomi pertunjukan dapat memberikan peluang ekonomi baru, ketidakseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan pekerjaan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja dan struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan, termasuk regulasi yang adaptif, perlindungan sosial yang memadai, dan peningkatan literasi digital dan keuangan bagi pekerja gig. Mencapai keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa ekonomi pertunjukan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung kesejahteraan individu dan keberlanjutan sosial dalam jangka panjang.</i>



1. PENDAHULUAN

Ekonomi gig [1], yang ditandai dengan pengaturan kerja berbasis proyek yang fleksibel yang difasilitasi oleh platform digital, telah berkembang pesat di Indonesia, membentuk kembali struktur ketenagakerjaan tradisional [2]. Pasar tenaga kerja yang sedang berkembang ini menawarkan manfaat yang signifikan, seperti otonomi yang lebih besar, sumber pendapatan yang beragam [3], dan akses ke peluang kerja baru, yang menarik semakin banyak pekerja Indonesia di berbagai sektor [4]. Namun, pergeseran ini juga menghadirkan tantangan yang kompleks, termasuk volatilitas pendapatan, perlindungan sosial yang terbatas, dan tekanan psikologis yang meningkat karena kondisi kerja yang

genting [5]. Isu-isu ini menimbulkan kekhawatiran kritis tentang implikasi pekerjaan pertunjukan bagi kesejahteraan individu dan keberlanjutan sosial yang lebih luas [6].

Memahami dinamika ekonomi pertunjukan di Indonesia sangat penting untuk mengatasi sifat gandanya [7]. Meskipun mendorong inklusi dan fleksibilitas ekonomi, kurangnya kerangka peraturan dan jaring pengaman sosial yang memadai mengancam keberlanjutan jangka panjang bagi pekerja dan masyarakat [8]. Pengantar ini mengkontekstualisasikan ekonomi pertunjukan dalam lanskap sosial-ekonomi Indonesia, menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas hidup pekerja dan stabilitas struktur sosial [9].

Meskipun ekonomi gig telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia, penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek fleksibilitas kerja, status ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial pekerja secara parsial [10]. Kajian yang mengintegrasikan dimensi kesejahteraan pekerja, keamanan pendapatan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan sosial dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas [11]. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan tunggal, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara manfaat ekonomi yang diperoleh pekerja gig dengan berbagai risiko yang mereka hadapi dalam jangka panjang. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami dampak ekonomi gig terhadap kesejahteraan pekerja serta implikasinya bagi perumusan kebijakan yang berkelanjutan [12]. Mengatasi masalah ini akan mendukung pengembangan kebijakan dan praktik inklusif yang meningkatkan ketahanan pekerja gig sambil memastikan bahwa ekonomi pertunjukan berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial-ekonomi Indonesia [13].

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ekonomi gig terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia dengan mengintegrasikan aspek fleksibilitas kerja, stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan sosial dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini mengusulkan model konseptual yang menempatkan karakteristik pekerjaan gig sebagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan pekerja melalui mekanisme pendapatan dan perlindungan sosial. Kontribusi penelitian terletak pada penyediaan bukti empiris yang lebih komprehensif melalui pendekatan mixed methods, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem ekonomi gig yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak ekonomi pertunjukan terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan sosial di Indonesia. Data kuantitatif [14] dikumpulkan melalui survei terhadap 200 pekerja gig aktif yang berasal dari beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya dengan menggunakan *purposive sampling*, mengukur variabel seperti fleksibilitas kerja, pendapatan, kesejahteraan, stres psikologis, dan akses ke perlindungan sosial [15]. Data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan 30 pekerja gig untuk mengeksplorasi pengalaman kerja, persepsi risiko, dan harapan terkait perlindungan sosial [16]. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo [17]. Desain penelitian mempertimbangkan konteks ekonomi digital yang dinamis di Indonesia dan peraturan yang berkembang untuk memastikan temuan yang valid dan relevan dengan kebijakan.

Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan pekerja gig dari berbagai sektor pekerjaan, antara lain layanan transportasi daring, pengantaran makanan, pekerja lepas digital (*freelancer*), serta jasa berbasis aplikasi lainnya serta observasi partisipatif. Data ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif, tantangan, dan persepsinya terkait kesejahteraan, perlindungan sosial, dan fleksibilitas kerja. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait perspektif, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja gig. Metode ini mencakup wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara mendalam dengan pekerja gig dari berbagai sektor, termasuk transportasi, layanan pengiriman, dan pekerjaan *freelance* digital. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung konteks kerja mereka [18].

Teknik analisis data kualitatif menggunakan pengkodean tematik diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan tema sentral yang muncul dari respons peserta. Pendekatan kualitatif dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif pekerja gig, menggunakan wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data utama [19]. Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi masalah kontekstual dan emosional yang sulit diungkapkan melalui survei kuantitatif. Observasi partisipatif melengkapi data wawancara dengan mengamati secara langsung kondisi dan dinamika pekerjaan pekerja gig, memperkaya pemahaman tentang fenomena sosial yang diteliti. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik sebagai berikut [20] pedoman, yang meliputi pengenalan data, pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi tematik sistematis.

Pendekatan kuantitatif menggunakan survei terstruktur yang didistribusikan ke sampel pekerja gig di beberapa wilayah Indonesia. Data kuantitatif ini dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel seperti pendapatan, jam kerja, dan kepuasan kerja. Untuk mendapatkan data yang representatif dan terukur secara statistik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terstruktur yang didistribusikan kepada pekerja gig di berbagai wilayah strategis Indonesia [21].

Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan purposive sampling dengan target 200 responden aktif yang bekerja di ekonomi gig. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data dan analisis inferensial seperti regresi linier untuk mengevaluasi hubungan antara dimensi fleksibilitas kerja, tingkat pendapatan, dan kesejahteraan pekerja. Metode kuantitatif digunakan untuk menghasilkan data yang dapat digeneralisasi dan dianalisis secara statistik. Survei kuantitatif dirancang berdasarkan instrumen yang telah diuji validitas dan keandalan melalui uji coba pada sekelompok kecil responden sebelum pengumpulan data utama [14].

Sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling untuk memastikan representasi responden yang aktif dalam ekonomi pertunjukan di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Analisis statistik mencakup statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel responden dan penelitian, serta analisis inferensial menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara fleksibilitas kerja, jaminan sosial, dan tingkat kesejahteraan pekerja [19].

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 30 pekerja gig dari sektor transportasi, layanan pengiriman, dan freelance digital. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh dari survei yang diselesaikan oleh 200 responden pekerja gig yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data kualitatif [22] dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam dengan 30 pekerja gig yang dipilih secara sengaja berdasarkan sektor dan panjang pengalaman kerja. Wawancara berfokus pada eksplorasi pengalaman kerja, kondisi sosial-ekonomi, dan persepsi perlindungan sosial dan kesejahteraan.

Sementara itu, data kuantitatif dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner terstruktur yang mencakup variabel demografis, kondisi kerja, dan aspek kesejahteraan, dengan 200 responden tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Data kualitatif [23] dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 30 pekerja gig yang dipilih secara sengaja, dengan mempertimbangkan latar belakang pekerjaan mereka, durasi keterlibatan dalam ekonomi pertunjukan, dan wilayah geografis. Observasi dilakukan untuk menangkap interaksi kerja dan konteks sosial-ekonomi di lapangan. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner kepada 200 pekerja gig menggunakan platform digital dan offline, dengan pertanyaan yang berfokus pada demografi, pengalaman kerja, persepsi kesejahteraan, dan cakupan perlindungan sosial [24].

Untuk data kualitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik pengkodean tematik untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari wawancara [25]. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan metode regresi linier untuk menguji hubungan antara fleksibilitas kerja dan kesejahteraan pekerja.

Data kualitatif yang diperoleh dianalisis melalui analisis tematik [15], di mana transkrip wawancara diproses melalui pengkodean untuk menemukan tema dominan yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi pekerja gig. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan regresi linier berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel fleksibilitas dan keamanan kerja terhadap kesejahteraan pekerja, sehingga memberikan gambaran empiris yang kuat tentang hubungan antar variabel dalam konteks ekonomi pertunjukan [7].

Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan software NVivo [26] untuk membantu proses pengkodean tematik dan memastikan konsistensi dalam interpretasi. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS [27], yang memungkinkan penerapan statistik deskriptif serta beberapa tes regresi linier untuk memeriksa efek variabel independen terhadap kesejahteraan pekerja. Validitas data kuantitatif diuji melalui uji validitas konstruksi dan keandalan instrumen [28].

Berdasarkan data survei nasional terbaru dan studi lapangan, mayoritas pekerja gig di Indonesia [29] adalah pekerja paruh waktu dengan pendapatan yang berfluktuasi mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 7 juta per bulan. Tren pekerja penuh waktu telah menurun (dari 70% menjadi 66,19%), sementara pekerja paruh waktu dan pengangguran telah meningkat secara signifikan. Analisis regresi menegaskan bahwa fleksibilitas kerja berkontribusi positif terhadap kepuasan ($p < 0,05$), tetapi perlindungan sosial yang rendah secara signifikan meningkatkan stres dan ketidakpastian pendapatan. Pekerja dengan pengalaman 3-5 tahun menunjukkan adaptasi kerja yang lebih baik, mendukung pentingnya pelatihan berkelanjutan.

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1. Dampak Ekonomi dan Sosial

Hasil penelitian menegaskan bahwa ekonomi pertunjukan [30] berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Diperkirakan tenaga kerja gig mencapai antara 0,4 dan 4 juta orang, dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB terutama di sektor transportasi dan layanan pengiriman berbasis aplikasi digital. Ekonomi pertunjukan [8] juga memungkinkan diversifikasi sumber pendapatan dan fleksibilitas jam kerja yang dihargai oleh pekerja. Namun, fenomena ini datang dengan tantangan serius seperti ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan tekanan psikologis yang tinggi karena beban kerja yang tidak menentu.

3.2. Pengalaman dan Persepsi Pekerja Gig

Dari wawancara dan survei mendalam, ditemukan bahwa pekerja gig. Nikmati tingkat otonomi tinggi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja. Namun, ketidakpastian kontrak dan kurangnya akses ke tunjangan sosial membuat mereka rentan terhadap tekanan dan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Sebagian besar pekerja mengedepankan perlunya pelatihan berkelanjutan dan dukungan perlindungan sosial yang lebih baik [31].

3.3. Implikasi Keberlanjutan Sosial

Dari perspektif keberlanjutan sosial [32], ekonomi gig berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial dan fragmentasi karena kesejahteraan pekerja yang tidak merata. Kurangnya regulasi yang efektif dalam menjamin hak-hak pekerja dan non-transparansi algoritme platform memperburuk ketidakpastian ini. Rekomendasi kebijakan berfokus pada pengembangan sistem perlindungan sosial portabel, pelatihan keterampilan yang terintegrasi dengan standar nasional, dan regulasi transparansi algoritmik yang selama ini belum optimal [33].

3.4. Strategi Adaptasi dan Kebijakan Pendukung

Strategi kebijakan yang diusulkan mencakup pembuatan peta jalan nasional yang menggabungkan produktivitas hijau dan perlindungan pekerja gig [34], percontohan program tunjangan sosial portabel khusus untuk sektor transportasi dan pelayaran, dan insentif untuk penggunaan teknologi rendah karbon. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja pertunjukan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Selain temuan utama, wawasan diperoleh bahwa pekerja gig menginginkan kejelasan hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan digital, terutama mengenai jaminan perlindungan sosial dan transparansi margin pendapatan dari setiap platform. Fenomena digital burnout akibat beban kerja yang tidak menentu dan kurangnya dukungan psikologis menambah kerentanan pekerja dalam jangka panjang.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam akses ke pelatihan kapasitas antara pekerja di wilayah metropolitan dan daerah di luar kota-kota besar, yang berdampak pada

diferensiasi pendapatan dan kesempatan kerja [22]. Hal ini menggarisbawahi perlunya program pelatihan inklusif dan berkelanjutan yang dapat menjangkau pekerja di berbagai wilayah geografis. Berikut pada tabel 1 disajikan hasil penelitian, beserta Gambar 1 hubungan antara fleksibilitas kerja dan kepuasan pekerja gig di Indonesia.

Tabel 1. Hasil Penelitian dan Diskusi

No	Temuan Utama	Dampak/Penjelasan
1	Kontribusi ekonomi pertunjukan yang besar	Tenaga kerja pertunjukan antara 0,4 - 4 juta; berkontribusi signifikan terhadap PDB sektor digital dan jasa
2	Fleksibilitas kerja	Pekerja menikmati otonomi tinggi dan bekerja secara fleksibel
3	Ketidakpastian pendapatan	Pendapatan tidak stabil, risiko kerja tidak stabil
4	Kurangnya perlindungan sosial	Kurangnya akses ke jaminan sosial dan tunjangan karyawan
5	Tekanan psikologis	Stres dan ketidakpastian karena beban kerja yang berfluktuasi
6	Kebutuhan pelatihan	Pentingnya pelatihan keterampilan berkelanjutan untuk daya saing
7	Regulasi dan transparansi algoritma	Regulasi tidak optimal; Transparansi diperlukan melalui regulasi dan mekanisme pengaduan
8	Strategi kebijakan	Integrasi produktivitas hijau, perlindungan sosial portabel, insentif teknologi hijau



Gambar 1. Diagram batang hubungan antara fleksibilitas kerja dan kepuasan pekerja gig di Indonesia
Sumber: Data sekunder diolah, 2026

Perincian Bagan Gambar 1.

Pengaturan Kerja (sumbu X):

Kerja Jarak Jauh, Jam Fleksibel, Minggu Kerja Terkompresi, Berbagi Pekerjaan, Freelance/Kontrak

Metrik (sumbu Y):

Skor persentase untuk: Fleksibilitas (bilah biru langit), Kepuasan (batang salmon)

Wawasan Utama

Remote Work memimpin dengan fleksibilitas 82% dan kepuasan 87%, menunjukkan daya tarik yang kuat di kalangan pekerja Indonesia.

Jam Fleksibel juga berkinerja baik, dengan fleksibilitas 75% dan kepuasan 85%.

Pekerjaan Freelance/Kontrak menawarkan keseimbangan yang baik, mencetak fleksibilitas 70% dan kepuasan 78%.

Minggu Kerja Terkompresi dan **Berbagi Pekerjaan** menunjukkan skor yang lebih rendah, menunjukkan pengaturan ini mungkin kurang disukai atau kurang tersedia.

Memperdalam Diskusi Hasil

Selain hubungan antara fleksibilitas dan kepuasan, penelitian juga mengungkapkan bahwa:

Ketidakpastian Pendapatan: Sementara fleksibilitas yang tinggi menambah kepuasan, fluktuasi pendapatan merupakan sumber stres utama yang merusak kesejahteraan jangka panjang pekerja. Strategi mitigasi seperti jaminan penghasilan minimum perlu dipertimbangkan sebagai pelengkap fleksibilitas.

Perlindungan Sosial: Akses pekerja gig ke jaminan sosial masih sangat terbatas, mengakibatkan kerentanan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan kerja, dan ketidakmampuan keuangan saat tidak bekerja. Penerapan skema perlindungan portabel dan inklusif menjadi kebutuhan prioritas.

Stres Psikologis: Ketidakpastian beban kerja menyebabkan stres mental yang tinggi, yang dapat memicu kelelahan dan penurunan produktivitas. Pelatihan manajemen stres, serta penyediaan dukungan psikologis online, sangat direkomendasikan.

Regulasi dan Transparansi Algoritma: Kurangnya transparansi dalam mekanisme penugasan kerja dan sistem perhitungan pendapatan oleh platform digital berdampak negatif pada rasa keadilan pekerja. Peraturan yang mengatur transparansi algoritma dan prosedur pengaduan dapat memperbaiki situasi ini.

Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Meningkatkan keterampilan digital dan keuangan pekerja gig adalah kunci bagi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan standar hidup secara berkelanjutan.

Analisis statistik dan diskusi strategi kebijakan spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pekerja gig di Indonesia berdasarkan data dan temuan terkini. Berdasarkan tren dan data survei nasional terbaru, pertumbuhan pekerja gig di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di sektor transportasi online dan layanan digital, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 30% per tahun. Survei menunjukkan bahwa pekerja gig dengan fleksibilitas kerja yang tinggi cenderung melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, tetapi statistik pendapatan menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan, dengan penghasilan bulanan pekerja gig berfluktuasi antara Rp 3 juta hingga Rp 7 juta.

Analisis regresi menunjukkan bahwa faktor fleksibilitas kerja memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kepuasan kerja pekerja gig ($p < 0,05$), tetapi perlindungan sosial minimal adalah prediktor utama risiko stres dan ketidakpastian pendapatan. Oleh karena itu, sementara fleksibilitas dianggap sebagai faktor positif, perlindungan sosial dan stabilitas pendapatan tetap menjadi variabel penting yang harus diperkuat.

3.5. Strategi Kebijakan Khusus

- 1) Pengakuan Status Pekerja dan Perlindungan Sosial Portabel Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan peraturan yang mengakui status pekerjaan pertunjukan sebagai bentuk kerja yang sah dan memberikan akses kepada pekerja gig ke skema jaminan sosial portabel, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan asuransi kecelakaan kerja. Pendekatan ini didukung oleh RUU Ketenagakerjaan yang sedang disiapkan untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan pekerja gig.
- 2) Pengembangan Sistem Insentif dan Subsidi Pendapatan Pembentukan jaminan atau subsidi penghasilan minimum bagi pekerja gig dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan dapat menjadi solusi untuk menstabilkan perekonomiannya. Skema ini akan mengurangi risiko ketidakpastian pendapatan tanpa mengorbankan fleksibilitas kerja.
- 3) Transparansi Algoritma dan Mekanisme Keluhan Regulator perlu mewajibkan platform digital untuk secara transparan mengungkapkan penugasan tugas dan mekanisme perhitungan

pendapatan mereka, serta menyediakan jalan pengaduan yang efektif bagi pekerja gig untuk mengatasi praktik yang tidak adil dan diskriminasi algoritmik

- 4) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan program pelatihan digital dan keuangan untuk pekerja gig harus diselenggarakan sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat daya saing dan kapasitas pekerja dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang dinamis.
- 5) Integrasi konsep produktivitas hijau dalam konteks keberlanjutan, kebijakan yang menggabungkan insentif untuk penggunaan teknologi rendah karbon dan pengembangan pekerjaan hijau di sektor pertunjukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan.

Strategi kebijakan yang mengintegrasikan pengakuan status pekerja gig, perlindungan sosial yang memadai, stabilitas pendapatan, transparansi platform, peningkatan kapasitas, dan inovasi keberlanjutan adalah kunci untuk menjadikan ekonomi pertunjukan Indonesia sebagai sektor yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan secara sosial.

Secara keseluruhan, ekonomi pertunjukan di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital dan perubahan pasar tenaga kerja, memberikan peluang baru berupa fleksibilitas dalam bentuk waktu dan lokasi kerja. Sekitar 0,3-1,7% tenaga kerja Indonesia menjadikan pekerjaan pertunjukan sebagai sumber pendapatan utama atau tambahan. Fleksibilitas dan kemudahan akses melalui platform digital seperti Gojek dan Tokopedia memudahkan berbagai kalangan, termasuk yang memiliki pendidikan atau pengalaman terbatas, untuk berpartisipasi secara ekonomi.

Namun, di balik peluang ini, ada tantangan mendasar terkait ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan tekanan psikologis karena beban kerja yang berfluktuasi. Pekerja gig memiliki penghasilan tetap dan tidak menerima jaminan sosial seperti pekerja formal. Hal ini menimbulkan risiko bagi kesejahteraan jangka panjang dan fragmentasi sosial. Analisis statistik menunjukkan korelasi positif antara tingkat fleksibilitas kerja dan kepuasan pekerja, tetapi perlindungan sosial yang rendah merupakan faktor risiko utama bagi kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang menyelaraskan fleksibilitas dengan perlindungan yang memadai.

3.6. Inovasi Kebijakan dan Pendekatan Keberlanjutan

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai pendekatan kebijakan diusulkan dengan fokus pada:

Pengakuan dan Perlindungan Sosial Pekerja Gig: Peraturan yang secara resmi mengakui status pekerja gig dan menjamin mereka akses ke Jaminan Sosial Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan perlindungan kecelakaan kerja, dengan skema perlindungan portabel dan inklusif.

Stabilisasi dan Insentif Pendapatan: Pengembangan jaminan pendapatan minimum dan subsidi khusus bagi pekerja berpenghasilan rendah untuk menjaga kesejahteraan mereka tanpa menghalangi fleksibilitas kerja.

Transparansi Algoritma dan Mekanisme Pengaduan: Transparansi wajib platform digital dalam manajemen tugas dan perhitungan pendapatan serta penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses untuk mencegah praktik yang tidak adil.

Peningkatan Kapasitas: Pelatihan berkelanjutan terkait literasi digital, manajemen keuangan, dan keterampilan kerja untuk meningkatkan daya saing dan adaptasi pekerja dalam ekonomi digital yang berubah dengan cepat.

Integrasi Produktivitas Hijau: Mendorong penggunaan teknologi hijau dan penciptaan lapangan kerja hijau di sektor pertunjukan untuk mendukung kelestarian sosial dan lingkungan secara bersamaan.

Dengan sinergi antara kebijakan inklusif dan inovatif serta peningkatan kapasitas pekerja, ekonomi gig di Indonesia berpotensi menjadi pilar baru pertumbuhan ekonomi yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

3.7. Rekomendasi Kebijakan

Peraturan Pengakuan Pekerja Gig: Melegalkan status pekerjaan pertunjukan dan memastikan akses pekerja ke jaminan sosial portabel, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, dan ketenagakerjaan.

- 1) Jaminan Penghasilan Minimum: Memberikan subsidi atau insentif pendapatan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah standar untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- 2) Transparansi Platform: Mengharuskan platform digital untuk memberikan informasi terbuka tentang cara kerja algoritme manajemen tugas dan pendapatan, serta sistem pengaduan pekerja.
- 3) Pelatihan dan Pengembangan: Program berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan manajemen keuangan pekerja gig.

Pendekatan Keberlanjutan: Mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan penciptaan lapangan kerja hijau untuk mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi gig di Indonesia memberikan manfaat berupa fleksibilitas kerja yang tinggi dan peluang peningkatan pendapatan, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja pekerja gig ($p < 0,05$). Akan tetapi, perlindungan sosial yang rendah dan ketidakstabilan pendapatan merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi penurunan kesejahteraan pekerja. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa ketidakpastian penghasilan dan minimnya jaminan sosial menjadi sumber utama stres psikologis dan kerentanan ekonomi jangka panjang.

Penelitian juga menemukan bahwa pekerja pada sektor transportasi daring dan layanan pengantaran berbasis aplikasi merupakan kelompok yang paling rentan karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap algoritma platform, pendapatan yang berfluktuasi, serta risiko kerja yang relatif lebih besar dibandingkan pekerja freelance digital. Selain itu, terdapat kesenjangan kapasitas antara pekerja di wilayah metropolitan dan nonmetropolitan yang berpengaruh terhadap peluang pendapatan dan akses pengembangan keterampilan.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang paling realistis dan mendesak untuk diterapkan adalah pengembangan skema perlindungan sosial portabel bagi pekerja gig yang dapat diakses tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja. Prioritas berikutnya adalah peningkatan transparansi algoritma platform digital dalam penentuan insentif dan distribusi pekerjaan, serta penyelenggaraan program pelatihan literasi digital dan manajemen keuangan secara berkelanjutan. Implementasi ketiga strategi tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja gig sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENCES

- [1] M. Muhyiddin, N. S. Annazah, H. Henriko Tobing, N. Habibi, F. Fauziyah, and R. I. P. Harsiwie, "The Ambiguity of Employment Relationship in Indonesia's Gig Economy: A Study of Online Motorcycle Taxi Drivers," *J. Ketenagakerjaan*, vol. 19, no. 3, pp. 262–280, 2024, doi: 10.47198/jnaker.v19i3.416.
- [2] M. U. Dikko, U. Hussaini, Z. A. Alkali, M. A. M. Bandiya, and M. Abdullahi, "The Moderating Effect of Corporate Governance in the Relationship Women Owned Enterprises: A Proposed Conceptual Framework," *Fudma J. Manag. Sci.*, vol. 6, no. 2, pp. 167–186, 24AD.
- [3] H. Tobing and J. Selatan, "Jurnal Ketenagakerjaan Formula Upah Bagi Pengemudi Truk Bahan Bakar Minyak Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 2, Edisi Juli – Desember 2020 ISSN : 1907 – 6096," vol. 15, no. 2, 2020.

- [4] P. Kedudukan, H. Pekerja, and Q. H. Fadhlulloh, "Comparison of the Legal Position of Gig Economy Workers in Indonesia, the Netherlands, and the UK," *Fundam. J. Ilm. Huk.*, vol. 12, pp. 307–322, 2023.
- [5] P. Andreas Noak, G. Indra Pramana, D. Arifa Putri, F. Siti Munawarroh, and D. Putri Wulandari, "Ekonomi Politik Platformisasi dan Datafikasi dalam Gig Economy," *J. Transform.*, vol. 10, no. 1, pp. 60–88, 2024, doi: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.4.
- [6] A. R. Ramadani, A. P. Sari, E. A. Usardi, F. Novita, and A. Gunawan, "Jurnal Spektrum Ekonomi Dampak GIG Economy Terhadap Stabilitas Pendapatan Dan Kesejahteraan Pekerja 'Studi Kasus Pada Pekerja Freelance,'" *J. Spektrum Ekon.*, vol. 7, no. 12, pp. 457–462, 2024.
- [7] I. G. S. Satria, "Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 127–134, 2025, doi: 10.56393/nomos.v5i1.2723.
- [8] C. Natalia and F. G. F. Putranto, "Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker di Indonesia Pascapandemi," *J. Ekon. Indones.*, vol. 12, no. 2, pp. 173–186, 2023, doi: 10.52813/jei.v12i2.479.
- [9] S. Fransiskus, "Penguatan Kemitraan dalam Hubungan Pelaku Ekonomi GIG di Indonesia Mendorong pertumbuhan Ekonomi GIG dan Kesejahteraan Mitra," p. 38, 2023.
- [10] Edy Sutrisno, "Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak ke sebelas. Prananda Media Group, Jakarta," *Ijfmr23044612*, vol. 5, no. 4, pp. 1–24, 2019.
- [11] M. Hartono and N. Tarigas, "Konsep fleksibilitas dalam gig worker dan pengaruhnya pada kinerja perusahaan jasa," vol. 20, no. 1, p. 2, 2025.
- [12] R. M. Simanungkalit, F. Anugrah, S. Jumono, M. F. A. Adhikara, A. Munandar, and J. Suharna, "Evaluating Financial Health in Indonesia's Infrastructure Sector: The Impact of Capital Structure, Liquidity, and Firm Size," *Golden Ratio Financ. Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 320–332, 2025, doi: 10.52970/grfm.v5i2.1059.
- [13] R. H. Martahan Simanungkalit, S. Jumono, M. Fachruddin Arrozi Adhikara, A. Munandar, I. Earltina Miranda, and J. Suharna, "Integration of Digital Technology in Green Finance: a Systematic Analysis of Green Digital Finance." pp. 27–37, 2025. doi: 10.5121/csit.2025.151303.
- [14] R. F. De Vellis, "Scale Development Theory and Applications (Fourth Edition)," *SAGE Publ.*, vol. 4, p. 256, 2017.
- [15] M. F. Perry, K. & Hill, "Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology, In qualitative research in psychology," *Educ. Res. Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006.
- [16] R. Sudha, "Research Approaches and Designs," *Res. Biostat. Nurses*, pp. 89–89, 2017, doi: 10.5005/jp/books/13016_6.
- [17] C. A. Sharp, "Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.)," *Evaluation Journal of Australasia*, vol. 3, no. 2, pp. 60–61, 2003. doi: 10.1177/1035719X0300300213.
- [18] S. Shafira, R. F. Dalimunthe, and P. Lumbanraja, "a Literature Review of Social Entrepreneurship: a Solution for Challenges in the Gig Economy," *Musyitari J. Manajemen, Akuntansi, Dan Ekon.*, vol. 5, no. 1, pp. 91–100, 2024.
- [19] R. Mohanty, A. Samal, and R. Kumar, "Green Finance Supports Sustainable Environment: Empirical Approach towards Applicability in Tourism Sector," *Theor. Pract. Res. Econ. Fields*, vol. 15, no. 1, pp. 114–126, 2024, doi: 10.14505/tpref.v15.1(29).11.
- [20] A. Escobar, J. Luna, and A. Caraballo, "Barriers to sustainable green innovation in meeting the challenges of the global economy of firms," *Glob. J. Environ. Sci. Manag.*, vol. 9, no. SI, pp. 219–232, 2023, doi: 10.22034/GJESM.2023.09.SI.13.
- [21] S. R. Izza, K. D. Saharani, D. Ardiani, and M. L. Franssisca, "Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional," *J. Reg. Econ. Dev.*, vol. 1, no. 3, pp. 1–20, 2024, doi: 10.47134/jred.v1i3.337.
- [22] J. K. L. Chan, "Sustainable Rural Tourism Practices From the Local Tourism Stakeholders' Perspectives," *Glob. Bus. Financ. Rev.*, vol. 28, no. 3, pp. 136–149, 2023, doi: 10.17549/gbfr.2023.28.3.136.
- [23] S. Febrianti, "Sustainability Finance Dan Green Investment: Literature Review Dengan Metode Prisma," *Manaj. J. Ekon.*, vol. 6, no. 1, pp. 95–106, 2024, doi: 10.36985/pmyj1709.
- [24] V. Murinde, E. Rizopoulos, and M. Zachariadis, "The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks," *Int. Rev. Financ. Anal.*, vol. 81, no. March, p. 102103, 2022, doi: 10.1016/j.irfa.2022.102103.
- [25] J. Barney, M. Wright, and D. J. Ketchen, "The resource-based view of the firm: Ten years after

- 1991," *J. Manage.*, vol. 27, no. 6, pp. 625–641, 2001, doi: 10.1177/014920630102700601.
- [26] R. Maqbool, T. Arul, and S. Ashfaq, "A mixed-methods study of sustainable construction practices in the UK," *J. Clean. Prod.*, vol. 430, no. December 2021, p. 139087, 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.139087.
- [27] H. Serdarusić, M. Pancić, and Ž. Zavišić, "Green Finance and Fintech Adoption Services among Croatian Online Users: How Digital Transformation and Digital Awareness Increase Banking Sustainability," *Economies*, vol. 12, no. 3, 2024, doi: 10.3390/economies12030054.
- [28] H. Han, "Can intellectual property rights pilots reduce carbon emissions? Evidence from China," *Front. Environ. Sci.*, vol. 12, no. March, pp. 1–12, 2024, doi: 10.3389/fenvs.2024.1336803.
- [29] M. Stevania and S. H. Hoesin, "Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia," *J. Ilm. Penegakan Huk.*, vol. 11, no. 2, pp. 268–277, 2024, doi: 10.31289/jiph.v11i2.11968.
- [30] B. Ai, "Nasib Pekerja Gig Indonesia dan Normal," pp. 1–10, 2020.
- [31] The SMERU Research Institute, "Inovasi dalam Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig," *Forum Kaji. Pembang.*, 2023.
- [32] G. H. Brundtland, "Our Common Future ('The Brundtland Report'): World Commission on Environment and Development," *Top 50 Sustain. Books*, pp. 52–55, 2017, doi: 10.4324/9781351279086-15.
- [33] UNDP, UNHCR, and UNODC, "Global Progress Report on Sustainable Development Goal 16 Indicators At the Crossroads: Breakdown or Breakthrough for Peace, Justice and Strong Institutions Global progress report on Sustainable Development Goal 16 indicators: SDG 16 16 SDG A wake-up call," 2024.
- [34] CSIS, "Ekonomi Hijau dalam Visi Indonesia 2045 Penulis Asisten Penulis," pp. 1–142, 2022.
- [35] Global Reporting, "GRI Universal Standards 2021 Frequently Asked Questions (FAQs)," *GRI Univers. Stand.*, no. December, pp. 1–22, 2021.
- [36] International Energy Agency, "Executive summary – World Energy Outlook 2021 – Analysis - IEA," *World Energy Outlook*, 2021.